

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan dalam lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.¹ Dapat dikatakan pula sistem keuangan merupakan suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk-beluk di bidang keuangan.² Hal ini berarti bahwa sistem keuangan itu sendiri tidak lain tersusun dari lembaga-lembaga keuangan yang kemudian memiliki fungsi utama sebagai lembaga perantara dalam sektor keuangan (*financial intermediation*) dimana tugas utamanya adalah menjadi suatu penghubung antara dua pihak yang memiliki keadaan berkebalikan dalam bidang keuangan, yakni antara pihak yang memiliki dana berlebih (*surplus of fund*) sementara di sisi lainnya adalah pihak yang kekurangan dana (*lack of fund*).³ Sistem keuangan memegang peranan krusial dalam rangka kelancaran suatu transaksi perekonomian yang diharapkan akan berimbas kepada

¹ Fekon, 2017, *Sistem Keuangan di Indonesia*, <https://unida.ac.id>, diakses tanggal 13 Februari 2018.

² Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,hal.1

³ Ibid, hal 3

pertumbuhan dan perkembangan keadaan perekonomian dalam suatu negara, selain itu bank juga harus mampu menjadi agen pembangunan (*Agent of Development*) dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat.⁴

Menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Asas Perbankan Indonesia adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tujuan perbankan adalah menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁵

Bank sebagai lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat atau *fiduciary relationship*. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum yang tidak bertanggungjawab, dan merusak sendi

⁴ Ibid, hal 3

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Hukum Perusahaan mengenai Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hal 19.

kepercayaan masyarakat tersebut.⁶ Bank sentral dan perbankan diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang perbankan.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 5 dijelaskan bahwa jenis Bank berbentuk bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Perbankan tahun 1998 dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸

Perkataan kredit telah lazim digunakan pada praktik perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Pengertian kredit dalam penggunaannya yang semakin meluas, sejauh mana relevansi penggunaannya dalam praktik bisnis umumnya dan perbankan khususnya. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang berarti percaya atau “credo” atau “creditum” yang berarti saya percaya. Maksudnya adalah si pemberi kredit percaya kepada si calon penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan

⁶M.Djumhana,*Rahasia Bank, Ketentuan dan penerapannya di Indonesia*,Bandung,Citra Aditya Bakti, 1996, Hal-29.

⁷ Rachmadi Usman, 2001,*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 22

⁸ Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hal 55

sesuai dengan perjanjian. Sedangkan, bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan. Sehingga, mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.⁹

Kredit secara konseptual merupakan, penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyedia dan tagihan uang tersebut. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain atau nasabah mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰

Di Indonesia, sudah sejak lama ada jenis bank yang khusus melayani masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasar-pasar dan di desa-desa, selain itu tugasnya adalah menghimpun dana tabungan masyarakat berupa deposito berjangka. Dalam mengembangkan usahanya, bank membuat berbagai produk perbankan yang ditawarkan pada nasabah-nasabahnya. Dengan kata lain, produk bank adalah seluruh fasilitas, layanan, dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat, baik pada sisi aset, misalnya kredit, termasuk kredit yang berada pada *for balance sheet (letter of credit, bank garansi)* dan sisi liabilities, berupa simpanan masyarakat serta jasa-jasa lainnya.¹¹ Dalam Undang-undang

⁹ Ashofatul Lailiyah.2014.*Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*.Vol 29 No.2. Pengamat Hukum.

¹⁰ Tri Widiyono.Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia.Bogor:Galia Indonesia.Hal-283.

¹¹ Ismail Nawawi,*Perbankan Islam Vs Konvensional*, Jakarta: VIV Press, 2010, Hal 87.

nomor 7 tahun 1992 jo Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 pasal 13 menjelaskan mengenai Usaha bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.¹²

Salah satu produk yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat adalah kredit. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya memerlukan dana tambahan untuk usahanya agar lebih berkembang. Kredit dalam hal ini daitur dalam pasal 1 angka 11 UU Perbankan adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dalam usahanya

¹² Soedjono Dirdjosisworo, Ibid, hal 19.

bank tidak hanya menyalurkan kredit saja tetapi juga berinvestasi pada kegiatan lain seperti penyertaan modal pada sebuah perusahaan dibidang keuangan.

Salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang menyediakan layanan kredit adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (PD.BPR Bank Jombang). Bank Milik Pemerintah Daerah sendiri adalah Bank Pembangunan Daerah, yang berdasarkan Pasal 54 UU Perbankan 1992 dimana dinyatakan bahwa UU No.13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok. Bank Pembangunan Daerah dinyatakan banyak berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya UU tersebut. Maka bentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut akan disesuaikan menjadi Bank Umum sesuai dengan UU Perbankan 1992.¹³

PD BPR Bank Jombang telah mengalami beberapa perubahan dalam sejarah perkembangannya. Pada 31 Maret 1978, status perusahaan-perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang diubah dengan keputusan Bupati nomor HK.OO3.2/09/1978 menjadi Dinas Perusahaan Daerah Kabupaten Dati II Jombang yang terdiri dari 4 (empat) unit yaitu : Unit Taman Rekreasi Tirta Wisata, Unit Saluran Air Minum, Unit Apotek Seger dan Unit Bank Pasar. Kemudian pada 07 November 1990, status perusahaan diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4, tahun 1990.

¹³ Widjanarto, Op.Cit, hal-58.

Pada tahun 1994, status perusahaan menjadi PD Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 1994. Pada tahun 1998 perusahaan memperoleh izin usaha menjadi BPR dengan nama PD BPR Bank Pasar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-041/KM.17/1998. Pada 06 November 2009 perusahaan berubah menjadi PD BPR Bank Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009.¹⁴

Karena Bank Jombang adalah Bank milik Pemerintah Daerah, maka banyak nasabah adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan staf yang bekerja pada lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jombang. Namun Bank Jombang juga tidak menutup kemungkinan membuka untuk umum, artinya adalah untuk warga sekitar yang berdomisili di Jombang yang tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Staf yang bekerja di lingkungan Pemerintahan kabupaten Jombang yang akan mendapatkan fasilitas dan layanan yang sama seperti tabungan, deposito, dan khususnya adalah pemberian kredit.

Di PD.BPR Bank Jombang pun memiliki banyak layanan kredit, diantaranya adalah :

- a. Kredit Pasar : Kredit Pasar adalah produk kredit yang pertama diberikan oleh PD.BPR Bank Jombang, Pangsa pasar dari kredit ini adalah perorangan atau badan usaha.¹⁵

¹⁴ Job deskripsi PD.BPR Bank Jombang, hal 2-3

¹⁵ Ibid, Hal 9

- b. Kredit Umum : Kredit umum adalah kredit yang ditunjukkan pada debitur secara umum untuk keperluan modal kerja atau investasi.¹⁶
- c. Kredit Pegawai : Kredit pegawai adalah kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan staff yang berkerja di lingkup Pemerintahan berpenghasilan tetap.¹⁷
- d. Kredit Program : Kredit program adalah kredit yang diberikan kepada usaha produktif milik perorangan atau badan usaha.
- e. Kredit Multiguna : Kredit multiguna adalah kredit untuk perorangan yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan keperluan konsumtif (renovasi rumah, biaya pendidikan, pembelian barang konsumtif, keperluan beribadah, keperluan hajatan, dan lain lain).¹⁸

Kredit adalah suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Kegiatan pemberian kredit adalah salah satu kegiatan utama dalam bank yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan kredit tersebut bukanlah semata-mata dana pribadi di bawah kepemilikan bank melainkan dana tersebut berasal dari simpanan para nasabahnya. Apabila sejumlah dana dalam jumlah besar yang disalurkan oleh bank

¹⁶ Company Profile PD.BPR Bank Jombang, hal 9-10

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Profile Company PD.BPR Bank Jombang, hal 10.

kepada masyarakat melalui kredit tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan maka kualitas kredit dapat digolongkan sebagai kredit bermasalah ataupun seringkali disebut dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL).¹⁹

Tingkat NPL yang tinggi akan berimplikasi kepada terganggunya likuiditas dari bank yang bersangkutan, kondisi ini bisa bertambah parah apabila kemudian para nasabah penyimpan tiba-tiba banyak yang menarik simpanannya dalam jumlah besar dimana bank mau tidak mau harus memberikan pembayaran tepat saat itu juga, tidak boleh menunda-nunda atau menolak akibatnya bank tersebut bisa mengalami kesulitan likuiditas.²⁰ Bila hal ini terjadi maka kepercayaan dari para nasabah akan dipertaruhkan bagi kelangsungan kegiatan usaha bank. Penting disadari kemudian, bahwa dalam setiap pemberian kredit akan selalu dihadapkan pada suatu risiko. Adapun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum bahwa yang menjadi risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan guna mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari adalah dengan menerapkan

¹⁹ Andita Pritasari, *Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip 5C*, <http://lib.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 28 November 2017.

²⁰ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Jakarta : Alfabeta, 2003) hal.2

suatu analisis yang akurat dan mendalam saat menilai kelayakan atas suatu permohonan fasilitas kredit.²¹

Kondisi Rumah Tangga (RT) cukup baik tercermin melalui peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), meskipun konsumsi masyarakat belum cukup kuat karena tekanan inflasi dan pelemahan kinerja sektor utama (lapangan usaha industri pengolahan) yang berpotensi menurunkan penghasilan. Permintaan kredit RT meningkat pada periode laporan, meskipun repayment capacity relatif turun yang tercermin pada memburuknya rasio *Non Performing Loan* (NPL). Walaupun menghadapi tantangan pelemahan ekonomi, kinerja perbankan Jawa Timur triwulan I 2017 membaik tercermin pada peningkatan aset, kredit dan DPK pada periode laporan. Peningkatan pertumbuhan kredit perbankan Jawa Timur terutama terjadi pada Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK), sementara Kredit Modal Kerja (KMK) melambat. Peningkatan KI khususnya pada lapangan usaha pertanian; transportasi; pergudangan dan komunikasi; perdagangan; serta industri pengolahan. Peningkatan KK perbankan Jawa Timur didorong peningkatan kredit multiguna, KKB motor dan KPR (tipe kecil dan menengah). Sementara perlambatan KMK terutama terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan. Berdasarkan kelompok bank, peningkatan kredit terutama terjadi pada BUKU I dan IV.²²

²¹ Ibid.

²² Kajian Ekonomi Regional (Asesmen Stabilitas Keuangan Daerah), <https://www.bi.go.id/id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Stabilitas sistem keuangan Jawa Timur triwulan II 2017 cukup terjaga di tengah tekanan yang dialami korporasi dan Rumah Tangga (RT). Kondisi RT cukup baik tercermin melalui peningkatan konsumsi masyarakat sejalan dengan perayaan Idul Fitri, meskipun menghadapi tekanan inflasi dan terbatasnya kinerja sektor industri pengolahan. Permintaan kredit RT tercatat meningkat dari 11,18% (yoy) menjadi 12,98% (yoy), meskipun masih mengalami penurunan repayment capacity yang tercermin pada memburuknya rasio *non performing loan* (NPL), yakni dari 1,25% menjadi 1,35%.²³

Stabilitas sistem keuangan Jawa Timur Triwulan III 2017 cukup terjaga di tengah pelemahan konsumsi Rumah Tangga (RT). Di sisi lain, kondisi RT cukup baik namun menahan konsumsi untuk mengantisipasi tingginya pengeluaran menjelang perayaan Natal, Tahun Baru serta libur sekolah. Kredit RT melambat dari 12,98% (yoy) menjadi 12,39% (yoy), rasio *non performing loan* (NPL) meningkat, yakni dari 1,35% menjadi 1,40%. Meskipun kinerja perbankan menunjukkan perbaikan, perlu diwaspadai risiko kredit yang kembali meningkat bahkan mencapai titik tertinggi dalam 3 tahun terakhir dipengaruhi peningkatan NPL korporasi dan RT. Di sisi lain, risiko likuiditas dan suku bunga relatif terjaga.²⁴

Namun mengingat dalam *intermediasi*, bahwa sebagian dana bank adalah berasal dari dana masyarakat. Maka pemberian kredit perbankan

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

banyak dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor: 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costomer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang erat berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Dalam kaitan ini, prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan dianut dan diterapkan pada perbankan Indonesia.²⁵ Bank telah menjelaskan dan mengamanatkan tentang prinsip kehati-hatian bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Termasuk dalam memberikan kredit. Pada umumnya penilaian yang diberikan oleh Bank kepada nasabah adalah prinsip kehati-hatian 5C, yaitu (*Character, Collateral, Capacity, Capital, Condition of Economy*) yang dapat juga diartikan sebagai (Karakter, Jaminan, Kapasitas, Modal, dan Kondisi Ekonomi. Prinsip 5C sendiri ini adalah prinsip yang digunakan Bank dalam mencegah adanya permasalahan yang timbul kemudian hari. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tidak memiliki penjelasan secara resmi. Kepercayaan masyarakat merupakan kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.

²⁵ Nurwahyuni dan Abd.Somad.2016.*Four Eyes Principles Dalam Pengelolaan Resiko Kredit Perbankan*. Yuridika:Vol.30 No.2.

Sehingga bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dalam menerapkan kebijakan harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan didasari dengan itikad baik serta wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan professional.²⁶

Dalam pasal 2 Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 yang sudah diganti dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan bawah perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat.²⁷

Pasal 29 ayat (2) mempertegas kembali pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan Perbankan yang menyebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan

²⁶ Mutiara Nur H.2016.*Faktor-faktor Bank dalam memberikan Pinjaman Kredit dengan Jaminan Barang Komoditas*.Vol IV no 1 jurnal Hukum Yustisia.Mahasiswa UNS.

²⁷ Maulina Yulianti.2018.*Penerapan Kehati-hatian Bank Dalam Memberikan Kredit Dengan Jaminan Resi gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara*.Vol 6 No.1.Jurnal Hukum Yustisia.Hal 136.

usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan Prinsip Kehatian.²⁸

Bank akan menilai seorang nasabah layak mendapatkan kredit dengan prinsip 5C tersebut. Dengan melihat dengan melihat aspek yang sudah termuat dalam prinsip 5C tersebut, yaitu bank sebagai kreditur akan melihat apakah calon nasabah memiliki *character* (karakter) yang baik untuk mendapatkan kredit tersebut, guna mencegah terjadinya kesengajaan ataupun kelalaian dalam menjalankan angsuran kredit yang sudah diberikan kreditur kepada calon nasabah atau debitur. Kemudian bank juga harus melihat *Collateral* (Jaminan), jaminan yang dimaksud adalah ketika seorang calon nasabah melakukan pengajuan pinjaman kredit maka kreditur atau bank wajib menilai jaminan yang akan diberikan calon nasabah, apakah jaminan tersebut mempunyai tingkat nominal yang setara dan dapat menutupi jumlah nominal yang diajukan untuk pinjaman kredit. *Capacity* (Kapasitas) atau yang dapat diartikan sebagai kemampuan dari seorang calon nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.²⁹

Kemudian adalah prinsip *capital* (modal) adalah posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang seorang

²⁸ Ibid.

²⁹ Rizki Abadi. (ed). 2015. *Prinsip 5C Bank dan Kredit Anda Diterima*, <https://www.cermati.com>, diakses tanggal 28 November 2017.

calon nasabah atau calon debitur. Kemudian yang terakhir adalah *condition of economy* (kondisi ekonomi) adalah melihat bagaimana kondisi ekonomi dari seorang calon nasabah atau calon debitur, apakah calon keuangan dari calon debitur ini dapat dipercaya untuk diberikan sejumlah kredit atau tidak.³⁰

Dalam memberikan kredit, Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atau lebih dikenal dengan prinsip 5C untuk setiap berkas permohonan kredit, sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, dengan menilai 5 Prinsip dari calon debitur. yaitu karakter calon debitur, modal dari calon debitur, kapastitas bayar dari calon debitur, agunan dan juga kondisi ekonomi dari calon debitur sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Prinsip 5c nantinya akan menjadi tolak ukur pengembalian uang yang di pinjam secara berangsur dengan baik dan benar tanpa permasalahan dikemudian hari. Namun, ketika suatu kredit yang diberikan tersebut menimbulkan permasalahan dan masuk dalam *kolektabilitas* kredit bermasalah atau kredit macet. Maka, timbulah pertanyaan apakah prinsip 5C ini benar-benar diterapkan dengan optimal oleh suatu Bank dan pejabat kredit yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap permohonan kredit dari calon debitur ataukah tidak diterapkan dengan optimal.

Sejatinya, banyak faktor dan alasan terjadinya kredit bermasalah. Salah satunya adalah tingkat penerapan prinsip kehati-hatian atau biasa

³⁰ Ibid.

disebut prinsip 5C. Maka menurut pemaparan latar belakang diatas, menarik untuk di bahas dan dikaji dalam Penulisan Hukum yang berjudul “IMPLEMENTASI PRINSIP 5C (*The Five C's of Credit*) DALAM RANGKA PEMBERIAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI DI PD.BPR BANK JOMBANG).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah implementasi prinsip 5C (*The Five C's Of Credit*) dalam rangka pemberian perjanjian kredit guna mencegah kredit bermasalah di PD.BPR Bank Jombang ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit bermasalah sesudah prinsip 5C (*The Five C's Of Credit*) diimplementasikan pada PD.BPR Bank Jombang ?

C. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi prinsip 5C (*The Five C's Of Credit*) dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah di PD.BPR Bank Jombang
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit bermasalah yang timbul sesudah diimplementasikannya prinsip 5C (*The Five C's Of Credit*) pada Bank Jombang

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Untuk PD.BPR Bank Jombang
 - a. Supaya dapat dijadikan masukan mengenai alasan-alasan terjadinya kredit bermasalah

- b. Supaya dapat dijadikan masukan ataupun catatan mengenai penerapan prinsip kehati-kehatian Bank Perkreditan Rakyat pada PD.BPR Bank Jombang
- c. Supaya dapat meningkatkan sistem atau prinsip kehati-hatian untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kredit yang bermasalah
- d. Supaya dapat dijadikan catatan atau masukan agar PD.BPR Bank Jombang menjadi lebih baik dalam perkembangannya.

2. Manfaat Untuk Penulis

- a. Supaya dapat memahami dan memberikan informasi terkait dengan Implementasi Prinsip 5C (*The Five C's Of Credit*) Supaya dapat memahami dan juga memberikan informasi mengenai upaya penyelesaian masalah yang timbul akibat penerapan prinsip 5C (*The Five C's Of Credit*) di PD.BPR Bank Jombang.

E. Kegunaan Penulisan

- 1. Sebagai Pemenuhan Penulisan Tugas Akhir (Skripsi)
- 2. Sebagai sarana pembelajaran untuk penulis dan pembaca untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dalam memberikan kredit berserta penyelesaian masalahnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan :

Dalam Penulisan ini akan digunakan metode penulisan dengan Yuridis-Sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.

a. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian :

Alasan memilih lokasi PD.BPR Bank Jombang karena Bank Jombang adalah Perusahaan Daerah yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki berbagai macam-macam jenis fasilitas kredit. Diantaranya adalah kredit pegawai, kredit khusus, kredit umum, kredit multiguna, kredit program, kredit pasar, pembiayaan haji. Yang mana dari program-program tersebut ada yang memang di khususkan kepada Pegawai Negri Sipil (PNS) dan pegawai yang bekerja dalam lingkup pemerintahan maupun masyarakat umum yang tidak bekerja dalam lingkup pemerintahan. Jadi artinya PD.BPR Bank Jombang juga memberikan fasilitas Kredit bagi masyarakat umum. Mengingat fokus yang akan dikaji oleh peneliti adalah mengenai prinsip mengenal nasabah atau yang biasa lebih dikenal dengan prinsip 5C (*character, collateral, capital, capacity, condition of economy*) dalam perjanjian kredit. Maka, menurut pandangan peneliti, lokasi yang dituju akan memberikan data-data yang kompleks mengenai bagaimana penerapan prinsip 5C dalam memberikan kredit kepada calon nasabah.

2. Jenis Data :

- a. Data Primer : adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang

diperoleh dari sumber yang utama pertama. adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif peraturan perundang-undangan. Maka disini adalah menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dan juga data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di PD.BPR Bank Jombang melalui wawancara dan studi lapang.

b. Bahan Hukum Sekunder : adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua. (sekunder Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 jo. Peraturan Bank Indonesia No.9/6/2007 jo. Peraturan Bank Indonesia No.11/2/PBI/2009 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Umum.

c. Bahan Hukum Tersier : adalah bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedi, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian : teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi ke lokasi penelitian langsung, yaitu PD.BPR Bank Jombang Pusat, kemudian juga dengan

melakukan wawancara dengan bagian marketing dan juga admin kredit mengenai prinsip 5C yang diterapkan dalam memberikan kredit, serta bagian *tim recovery* yang untuk mengetahui tahapan cara dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah. dan juga dokumentasi dokumen yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

4. Analisis data :

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara kualitatif, kualitatif adalah penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu metode wawancara dan observasi.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I : bab 1 biasanya berjudul “PENDAHULUAN” yang didalamnya berisikan 6 sub bab, yaitu :

a) Latar Belakang

Dalam sub bab ini, penulis menjelaskan tentang pentingnya masalah tersebut diteliti, yang dilengkapi dengan hasil-hasil observasi di lapangan. Menyikapi dan meyakini bahwa dilapangan/masyarakat terdapat hal hal yang memang perlu dibahas dan diteliti.

b) Rumusan Masalah

Kejelasan penulisan latar belakang sangat membantu dalam membuat rumusan masalah yang tepat. Latar belakang yang baik harus mampu memberi “umpan” dalam merumuskan masalah.

c) Tinjauan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan Penulisan Hukum yang harus mengarah pada tujuan yang hendak diperoleh.

d) Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh subyek-subyek yang terkait dengan topik penelitian

e) Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dapat digunakan pada obyek-obyek terkait dengan topik penelitian

f) Metode Penelitian

Permasalahan perlu mendapatkan “jawaban”. Jawaban yang dimaksud tidak cukup atas penilaian subyektif penulis. Melaikan harus didukung dengan data yang diinginkan. Menjelaskan tentang pendekatan hukum yang dipakai, yakni melihat hukum sebagai perilaku, sebagai norma di masyarakat.

1) Menjelaskan tempat/lokasi penelitian disertai dengan alasan ilmiah pemilihan atau penentuan tersebut.

2) Menjelaskan tentang sumber data /bahan hukum, baik primer maupun sekunder.

3) Teknik pengumpulan data/bahan hukum

- 4) Analisis data, dapat dilakukan dengan melihat jenis penelitian yang dilakukan penulis.

G. Sistematika Penulisan

2. BAB II : Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan judul yang penulis ajukan, diantaranya pemahaman tentang Implementasi, penerapan, prinsip 5C, perjanjian kredit, mencegah, terjadinya kredit bermasalah.
3. BAB III : Bab ini merupakan yang memuat pembahasan dan analisa penulis tentang implementasi penerapan prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economy*) dalam perjanjian kredit guna mencegah terjadinya kredit bermasalah.
4. BAB IV : A. Penutup
1. Kesimpulan
bab ini merupakan kesimpulan yang telah penulis dapatkan dari implementasi prinsip 5C (The Five C's Of Credit) dalam perjanjian kredit perbankan (Studi di PD.BPR Bank Jombang)
 2. Saran.
adalah solusi hukum dalam permasalahan yang timbul dari penerapan prinsip 5C.³¹

³¹ Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2016, Hal 17.